

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 4, Desember 2015

ISSN 0853-9316

- **URGENSI MEMBANGUN PARLEMEN MODERN**
oleh: Debora Sanur
- **PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**
oleh: Monika Suhayati
- **POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA**
oleh: Shanti Dwi Kartika
- **MASALAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN JAWA TENGAH**
oleh: Mandala Harefa
- **OPTIMALISASI PERAN PANAS BUMI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PANAS BUMI**
oleh: Hariyadi
- **PERAN STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI DAN TOKOH AGAMA DALAM COLLECTIVE EFFICACY KOMUNITAS**
oleh: Davy Hendri



Diterbitkan oleh
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 4, Desember 2015

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
● URGENSI MEMBANGUN PARLEMEN MODERN <i>oleh: Debora Sanur</i>	305-316
● PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT <i>oleh: Monika Suhayati</i>	317-327
● POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA <i>oleh: Shanti Dwi Kartika</i>	329-344
● MASALAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN JAWA TENGAH <i>oleh: Mandala Harefa</i>	345-366
● OPTIMALISASI PERAN PANAS BUMI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PANAS BUMI <i>oleh: Hariyadi</i>	367-382
● PERAN STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI DAN TOKOH AGAMA DALAM <i>COLLECTIVE EFFICACY</i> KOMUNITAS <i>oleh: Davy Hendri</i>	383-398

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal “*Kajian*”: edisi bulan Desember 2015 menyajikan 6 tulisan dengan latar belakang ilmu yang bervariasi. Keenam tulisan ini merupakan hasil seleksi dari 8 karya tulis ilmiah yang masuk ke redaksi jurnal “*Kajian*”. Keenam tulisan itu diawali dengan tulisan Debora Sanur tentang Urgensi Membangun Parlemen Modern. Tulisan ini mengungkapkan bahwa selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah. Untuk itu DPR mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern. Melalui parlemen modern masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Di lain pihak, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjawab untuk menguraikan penyebab perlunya DPR membangun konsep parlemen modern, faktor pendukung terciptanya parlemen modern serta cara mewujudkan parlemen modern. Tulisan ini menggunakan konsep perwakilan, akuntabilitas, parlemen modern dan demokrasi digital. Walau penerapan konsep parlemen modern ini tidak mudah, namun DPR perlu terus berupaya mewujudkannya demi memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia.

Tulisan kedua adalah kajian Monika Suhayati tentang pengaturan sistem organisasi advokat dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi advokat sebagai tempat berlindung para advokat. Sistem *single bar association* yang dianut oleh Undang-Undang Advokat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pengambilan sumpah bagi para calon advokat. Permasalahan ini hendak diatasi melalui perubahan Undang-Undang Advokat. RUU Advokat memberikan pengaturan yang lebih tegas soal kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat. Penulis menilai sistem organisasi *federation of bar association* dapat menjadi pilihan terbaik di Indonesia karena sistem ini mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara. Lebih jauh lagi, pembentukan Dewan Advokat Nasional diatur dalam RUU Advokat dapat menjadi solusi atas konflik yang terjadi antarorganisasi advokat saat ini. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, mendesak untuk segera mengesahkan RUU Advokat ini demi memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat dan pada akhirnya bagi para pencari keadilan.

Berikutnya tulisan dari Shanti Dwi Kartika yang membahas tentang politik hukum penanggulangan bencana. Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum UU No. 24 Tahun 2007 dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Kedua hal itu dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa politik hukum penanggulangan bencana merupakan pembangunan hukum dan pembentukan hukum baru dalam penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan hukum penanggulangan bencana dan perubahan UU No. 24 Tahun 2007.

Tulisan keempat merupakan hasil penelitian individu dari Mandala Harefa tentang masalah dan tantangan implementasi program kredit usaha rakyat di provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha skala kecil di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Manajemen KUR dilaksanakan lembaga perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menilai bahwa dalam implementasi kebijakan KUR di kedua provinsi masih terdapat beberapa permasalahan dalam kriteria usaha kecil yang dapat memperoleh KUR; penilaian kelayakan usaha kecil yang produktif; kemampuan usaha kecil mengembangkan usahanya; jaringan pemasaran produk usaha kecil, dan lain-lain. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah dipilih secara sengaja sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh KUR. Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan

oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Di samping itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.

Tulisan kelima merupakan hasil analisis dari Hariyadi tentang optimalisasi peran panas bumi dalam kerangka Undang-Undang Panas Bumi. Pengesahan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menggantikan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menguatkan kemauan politik negara dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan untuk memperkuat program listrik 35.000 MW dan ketahanan energi nasional. Dengan menggunakan konsepsi “ketimpangan tata kelola” sebagai alat analisis, tulisan yang bersifat tinjauan pustaka dan dengan sebagian data yang dikumpulkan dalam pembahasan RUU tentang Panas Bumi pada tahun 2014 menemukan bahwa kerangka UU panas bumi yang baru belum memperlihatkan dampak yang signifikan bagi pengembangan peran panas bumi dan program listrik 35.000 MW. Beberapa persoalan ketimpangan yang belum terjembatani dari aspek-aspek pengetahuan, normatif, kelembagaan dan kepatuhan dapat dinilai sebagai faktor yang menyebabkan kerangka UU panas bumi yang baru belum sesuai yang diharapkan. Karena itu, sejumlah kendala yang harus segera dikelola pemerintah mencakup perlunya penguatan kemauan politik negara dalam penegakkan kerangka hukum baru berikut sejumlah regulasi terobosan khususnya terkait pengembangan panas bumi secara normatif, kelembagaan, otoritas dan sumber daya yang diperlukan.

Tulisan keenam dari Davy Hendri yang meneliti tentang peran struktur sosial-ekonomi dan tokoh agama. Mengurangi perilaku anti-sosial warga telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia sejak beberapa waktu terakhir. Pembentukan *collective efficacy* yang dimaksudkan sebagai gambaran kapasitas masyarakat dalam menegakkan regulasi sosial dalam rangka mewujudkan partisipasi warga berupa kegiatan bersama (*collective action*) seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan pencegahan perilaku anti-sosial termasuk kriminalitas lokal. Namun, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Artikel ini menguji hubungan antara struktur sosial-ekonomi dengan penciptaan *collective efficacy*. Berbeda dengan beberapa penelitian setema, paper ini memunculkan kualitas pengaruh tokoh agama sebagai konstruk dari *collective efficacy*. Dalam konteks ini, keharmonisan dan penegakan aturan bersama yang merupakan wujud dari *collective efficacy* dapat diinisiasi oleh tokoh agama sebagai pemimpin informal di level komunitas itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dengan unit analisis komunitas berbasis sekitar 400 kabupaten/kota dari 33 provinsi se-Indonesia secara *cross-section* pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan fakta bahwa struktur sosial-ekonomi komunitas yang stabil amat menentukan pembentukan *collective efficacy* dan pemimpin lokal berkualitas terutama tokoh agama ternyata berperan penting mendorong menciptakan *collective efficacy* pada level komunitas.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada Jurnal “Kajian” edisi bulan Desember 2015. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan Jurnal “Kajian” di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli, M.Si., Dra. Ani Widayani Soetjipto, M.A., Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy dan Lilis Mulyani, S.H., M.H., sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Kajian* edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2015

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Debora Sanur L (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

URGENSI MEMBANGUN PARLEMEN MODERN

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 305-316

Selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah. Untuk itu DPR mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern. Melalui parlemen modern masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dilain pihak, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penulisan ini untuk menguraikan penyebab perlunya DPR membangun konsep parlemen modern, faktor pendukung terciptanya parlemen modern serta cara memwujudkan parlemen modern. Tulisan ini menggunakan konsep perwakilan, akuntabilitas, parlemen modern dan demokrasi digital. Walau penerapan konsep parlemen modern ini tidak mudah, namun DPR perlu terus berupaya mewujudkannya demi memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia

Kata kunci: DPR, Parlemen Modern, Akuntabilitas, Teknologi Informasi, Demokrasi Digital.

**PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 317-328

Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi advokat sebagai tempat berlindung para advokat. Sistem *single bar association* yang dianut oleh Undang-Undang Advokat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pengambilan sumpah bagi para calon advokat. Permasalahan ini hendak diatasi melalui perubahan Undang-Undang Advokat. RUU Advokat memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat. Penulis menilai sistem organisasi *federation of bar association* dapat menjadi pilihan terbaik di Indonesia karena sistem ini mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara. Lebih jauh lagi, pembentukan Dewan Advokat Nasional yang diatur dalam RUU Advokat dapat menjadi solusi atas konflik yang terjadi antarorganisasi advokat saat ini. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, mendesak untuk segera mengesahkan RUU Advokat demi memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat dan pada akhirnya bagi para pencari keadilan.

Kata kunci: profesi advokat, organisasi advokat, kebebasan berserikat, RUU Advokat, UU Nomor 18 Tahun 2003.

POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 329-342

Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum UU No. 24 Tahun 2007 dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Kedua hal itu dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum penanggulangan bencana merupakan pembangunan hukum dan pembentukan hukum baru dalam penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan hukum penanggulangan bencana dan perubahan UU No. 24 Tahun 2007.

Kata kunci: bencana alam, penanggulangan bencana, politik hukum, UU No. 24 Tahun 2007.

**MASALAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
DI PROPINSI SULAWESI SELATAN DAN JAWA TENGAH**

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 343-366

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha skala kecil di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Manajemen KUR dilaksanakan lembaga perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menilai bahwa dalam implementasi kebijakan KUR di kedua provinsi masih terdapat beberapa permasalahan dalam kriteria usaha kecil yang dapat memperoleh KUR; penilaian kelayakan usaha kecil yang produktif; kemampuan usaha kecil mengembangkan usahanya; jaringan pemasaran produk usaha kecil, dan lain-lain. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah dipilih secara sengaja sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh KUR. Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Di samping itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.

Kata kunci: kredit usaha rakyat, KUR, usaha kecil, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah.

OPTIMALISASI PERAN PANAS BUMI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PANAS BUMI

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 367-378

Pengesahan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menggantikan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menguatkan kemauan politik negara dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan untuk memperkuat program listrik 35.000 MW dan ketahanan energi nasional. Dengan menggunakan konsepsi “ketimpangan tata kelola” sebagai alat analisis, tulisan yang bersifat tinjauan pustaka dan dengan sebagian data yang dikumpulkan dalam pembahasan RUU tentang Panas Bumi pada tahun 2014 menemukan bahwa kerangka UU panas bumi yang baru belum memperlihatkan dampak yang signifikan bagi pengembangan peran panas bumi dan program listrik 35.000 MW. Beberapa persoalan ketimpangan yang belum terjembatani dari aspek-aspek pengetahuan, normatif, kelembagaan dan kepatuhan dapat dinilai sebagai faktor yang menyebabkan kerangka UU panas bumi yang baru belum sesuai yang diharapkan. Karena itu, sejumlah kendala yang harus segera dikelola pemerintah mencakup perlunya penguatan kemauan politik negara dalam penegakkan kerangka hukum baru berikut sejumlah regulasi terobosan khususnya terkait pengembangan panas bumi secara normatif, kelembagaan, otoritas dan sumber daya yang diperlukan.

Kata kunci: panas bumi, energi terbarukan, ketahanan energi, program listrik, ketimpangan tata kelola.

**PERAN STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI DAN TOKOH AGAMA DALAM
COLLECTIVE EFFICACY KOMUNITAS**

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, hlm. 379-394

Mengurangi perilaku anti-sosial warga telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia sejak beberapa waktu terakhir. Pembentukan *collective efficacy* yang dimaksudkan sebagai gambaran kapasitas masyarakat dalam menegakkan regulasi sosial dalam rangka mewujudkan partisipasi warga berupa kegiatan bersama (*collective action*) seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan pencegahan perilaku anti-sosial termasuk kriminalitas lokal. Namun, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Artikel ini menguji hubungan antara struktur sosial-ekonomi dengan penciptaan *collective efficacy*. Berbeda dengan beberapa penelitian setema, paper ini memunculkan kualitas pengaruh tokoh agama sebagai konstruk dari *collective efficacy*. Dalam konteks ini, keharmonisan dan penegakan aturan bersama yang merupakan wujud dari *collective efficacy* dapat diinisiasi oleh tokoh agama sebagai pemimpin informal di level komunitas itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dengan unit analisis komunitas berbasis sekitar 400 kabupaten/kota dari 33 provinsi se-Indonesia secara *cross-section* pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan fakta bahwa struktur sosial-ekonomi komunitas yang stabil amat menentukan pembentukan *collective efficacy* dan pemimpin lokal berkualitas terutama tokoh agama ternyata berperan penting mendorong menciptakan *collective efficacy* pada level komunitas.

Kata kunci: struktur sosial-ekonomi, tokoh agama, perilaku anti-sosial, aksi kolektif, komunitas efektif kolektif

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Debora Sanur (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

URGENCY FOR DEVELOPING MODERN PARLIAMENT

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 305-316

Up until now, the satisfaction level of citizen to their representative on House of Representative Indonesia is still Low. Therefor House of Representative Indonesia develop new concept which is modern parliament. Through modern parliament, citizen will able to communicate their aspiration directly to their representative related on many issues that currently happen. On the other hand, House of Representative Indonesia will be able to be an institution that able to fulfill society needs. This article aim to decipher the cause of the need for house of representative Indonesia to develop modern parliament concept, supporting factors to create modern parliament and how to materialize modern parliament. This article is using representative concept, accountability, modern parliament and digital democracy. Even though application of modern parliament concept is not convenient, but house of representative indonesia need to strive to materialize this concept to strengthen representative democracy in Indonesia.

Keywords: House of Representative Indonesia, A Modern Parliament, Accountability, Information Technology, Digital Democracy.

**REGULATING BAR ORGANIZATION SYSTEM IN DRAFT LAW ON
AMANDEMENTS OF LAW NO. 18/2003 ON BARRISTER**

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 317-328

Advocate profession has a close relation with advocate organization as their safe haven. A single bar association system adopted by the Indonesian Law on advocate produces various problems i.e. on the legality of the instalation and oath of advocate candidates. These problems sholud be addressed by amending the existing law on, including introducing a stiffer regulation on freedom to create advocate association. The writer says that the introduction of organization system of a federation of bar association can be best option in Indonesia for the reason that this system accomodate freedom of association and assemble guaranteed in the state constitution. This can also contribute to the creation of National Advocate Council as a solution to the currently conflict amongs to different advocate organizations. As a consequence, the writer argues that there is urgency to immediatly pass the amending law to give law certainty for advocate profession and, eventulaly, for justice seekers.

Keywords: advocate profession, advocate organization, bar association, freedom of organization, Draft Law on Advocate Association, Law No. 18/2003.

LEGAL POLITICS OF NATURAL DISASTER HANDLINGS

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 329-342

Indonesia is identified as a country with very high potential of natural disaster. Such disaster can give impact to national economy, welfare, and state politics, so that people urge the government to pay better attention to disaster management by providing adequate legal instruments. This situation has further led to the making of Law No. 24/2007 on Disaster Management. Nevertheless, there several problems remain regarding basic legal politics of the Law No. 24/2007 and substance of the legal politics in disaster management. Both kinds of the problems should be, according the writer, properly addressed by using legal approaches. This essay argues that legal politics of natural disaster handling is the construction law and the legal establishment on disaster management. In substance, this legal politics provide a paradigm shift in disaster management. There are also problems regarding contradiction among related existing laws, authority, and institutions in disaster management. Therefore, it is necessary to review the legal policy of disaster management and revision of the Law No. 24/2007.

Key word: natural disaster, disaster management, the legal politics, Law No. 24/2007.

PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF SMALL SCALE BUSINESSES OR INDUSTRIES LOANS PROGRAM IN THE PROVINCES OF SOUTH SULAWESI AND CENTRAL JAVA

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 343-366

Loans for small scale industries (KUR) is a government policy to help people in the region develop their small scale industries or businesses in Indonesia, include in the provinces of South Sulawesi and Central Java. In this case, the KUR management there are conducted by banks appointed by the central government. Findings of this research shows that the implementation of KUR policy in the two provinces is hampering problems in determining criteria of industries or business which deserves for the loans, as well as their productivity, and also capability to develop their businesses and market network, and so forth. The research was conducted by adopting a qualitative approach, using a descriptive-analytical method. South Sulawesi and Central Java provinces have been purposively chosen as samples. The findings more specifically show that criteria made by the appointed banks is a main constraint for small scale industries' access to KUR, and if they will confront higher risks and uncertainties, their access to it would be more difficult. Apart from this, their ability to deal with financial matters, which is still not well, which will implicate their ability to return the KUR they received has been also considered and constrained their access to it.

Keywords: small scale loans, KUR, small scale businesses, South Sulawesi, Central Java.

OPTIMIZATION ROLE OF GEOTHERMAL IN GEOTHERMAL REGULATION FRAMEWORK

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 367-378

The enactment of the Law No. 21/2014 on Geothermal replacing the previous Law No. 27/2003 on Geothermal reinforces the state's political will to develop geothermal energy sources as renewable energy to sustain the 35.000 MW power plants programme and eventually the national energy security. By using 'gaps in governance' concept as an analytical tool, this literature review study, supported by related data collected from the geothermal bill consideration process in the parliament in 2014, found that the new legal framework has not shown any significant impact to trigger the geothermal development and the 35.000 MW power plants programme. Several 'gaps in governance' untapped such as gaps in knowledge, normative, institutional and compliance aspects may become factors to enable the new legal framework not as expected. It is therefore the government should strengthen its political will to enforce the new law as well as its sets of statutory regulations in frameworks of normative, institutional, and resources aspects needed.

Keywords: geothermal, renewable energy, security energy, program listrik, power plants, gaps in governance.

THE ROLE OF SOCIAL-ECONOMY STRUCTURE AND RELIGIOUS LEADER IN COLLECTIVE EFFICACY COMMUNITY

Kajian Vol. 20, No. 4, Tahun 2015, pp. 379-394

Reducing citizen's anti-social behaviour has become a major problem that must be faced by governments in various countries of the world, including Indonesia, since the past few days. The establishment of collective efficacy is intended as an overview of community capacity to enforce the social regulation in order to achieve citizen participation in activities (collective action) should be one of the goals of anti-social behaviour prevention policies. In the socio-economic structure are very heterogeneous community, realizing it is becoming a big challenge. This article examines the relationship between socio-economic structure (SES) of the community with the creation of collective efficacy. In contrast to some studies on the same theme, this paper raises the quality of the influence of religious leaders as a construct of collective efficacy. In this context, harmony and enforcement of common rules is a form of collective efficacy can be initiated by religious leaders (ulama) as informal leaders at the community level itself. Furthermore, continued with the analysis of the impact of collective efficacy in the community against efforts to create public goods such as security through collective action, by and at the level of the community itself. Analyses were performed using socio-economic data analysis unit based community with about 400 districts /cities of 33 provinces in Indonesia in cross-section in 2011. This study found that the socio-economic structure of stable communities, especially in determining the formation of collective efficacy and quality and local leaders, especially religious leaders turned out to encourage collective action play an important role in the prevention of anti-social behaviour.

Keywords: social-economy structures, religious leaders, anti-social behaviour, collective action, collective efficacy community.